

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	RIKIAN, SP	1	Nama	DEVI HARYANTI, SP		
2	NIP	19820818 200604 1 006	2	NIP	19820425 200902 2 002		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata III/c	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda TK I,III/b		
4	Jabatan	Kasi. Tanaman Pangan	4	Jabatan	Staf. Produksi tanaman Pangan dan Hortikultura		
5	Unit Kerja	Dinas Pertanian Kabupaten kaur	5	Unit Kerja	Dinas Pertanian Kabupaten Kaur		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANT/OUT PUT	KUAL/MU TU	WAKTU	BIAYA
1	Membuat laporan statistik tanaman pangan Kabupaten Kaur			15 Dokumen	100	12 bulan	-
2	Membuat laporan kegiatan SL-PTT khusus tanaman padi sawah, padi ladang dan kedelai.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
3	Memonitor serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
4	Melakukan survey Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) kegiatan tanaman pangan dan hortikultura.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
5	Melaksanaka tugas lain yang diberikan oleh atasan.			15 Dokumen	100	12 bulan	-

Pejabat Penilai,

RIKIAN, SP
NIP. 19820818 200604 1 006

Bengkulu, 02 Januari 2015
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

DEVI HARYANTI, SP
NIP.19820425 200902 2 002

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	RIKIAN, SP	1	Nama	DEVI HARYANTI, SP		
2	NIP	19820818 200604 1 006	2	NIP	19820425 200902 2 002		
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata III/c	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda TK I,III/b		
4	Jabatan	Kasi. Tanaman Pangan	4	Jabatan	Staf. Produksi tanaman Pangan dan Hortikultura		
5	Unit Kerja	Dinas Pertanian Kabupaten kaur	5	Unit Kerja	Dinas Pertanian Kabupaten Kaur		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANT/OUT PUT	KUAL/MU TU	WAKTU	BIAYA
1	Membuat laporan statistik tanaman pangan Kabupaten Kaur			15 Dokumen	100	12 bulan	-
2	Membuat laporan kegiatan SL-PTT khusus tanaman padi sawah, padi ladang dan kedelai.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
3	Memonitor serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
4	Melakukan survey Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) kegiatan tanaman pangan dan hortikultura.			15 Dokumen	100	12 bulan	-
5	Melaksanaka tugas lain yang diberikan oleh atasan.			15 Dokumen	100	12 bulan	-

Pejabat Penilai,

Bengkulu, 03 Januari 2016
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

RIKIAN, SP
NIP. 19820818 200604 1 006

DEVI HARYANTI, SP
NIP.19820425 200902 2 002

Lampiran I : Surat Keputusan Bupati Kaur
 Nomor : 188.4.45 - 108 Tahun 2017
 Tanggal : 6 Oktober 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN KAUR
 TAHUN 2017 - 2022**

MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Nilai	Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efisien	Hasil evaluasi opini BPK	BKD	Opini BPK : 1. WTP 2. WDP
2.	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasail Evaluasi AKIP	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No.29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kaur	Semua OPD	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kaur diukur sesuai dengan Permenpan No.25 Tahun 2012 tentang Juklak Evaluasi Akip serta perubahannya.
		Nilai LPPD	Nilai	Berdasarkan PP NO. 03 Tahun 2007 Pemeritah Kabupaten Kaur berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dae	Semua OPD	<u>Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD:</u> 1. 3,00 ≤ ≤ 4,00 : Sangat Tinggi 2. 2,00 < < 3,00 : Tinggi 3. 1,00 < < 2,00 : sedang 4. 0,00 < < 1,00 : Rendah
3	Meningkatakan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD dengan SPM Baik	%	Sesuai Amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik	Jumlah OPD dengan SPM 75 atau lebih dibagi dengan seluruh OPD X 100 %	OPD Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik yang prima

MISI 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah - wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Infrastruktur jalan dan jembatan terbangun	Km	Memenuhi target kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Kaur	Panjang Infrastruktur jalan dan Jembatan terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	%	SPM	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (PERMEN PU No. 14/PRT/M/2010 ttg SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	%	SPM	$\frac{\text{Jumlah PJU yang ada}}{\text{Jumlah Standar Kebutuhan Ketersediaan PJU}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memenuhi target SPM
		Persentase Rumah tangga Pengguna layanan air bersih	%	Masih rendahnya pengguna layanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna layanan air bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruh Kabupaten Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	Revitalisasi dan rekonsi jaringan irigasi	Prosentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kaur dengan Kriteria baik	%	Sesuai amanat Peraturan menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kabupaten Kaur	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Kaur}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	RTH yang berkualitas adalah RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.

MISI 3 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan	Memperbanyak bantuan sarana keagamaan	Jumlah	Meningkatkan aktivitas dan fasilitas keagamaan	Jumlah sarana keagamaan yang diadakan	Bagian KESRA SETDA	
		Meningkatnya kualitas kompetensi guru Ngaji dan pengurus masjid.	%	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi guru ngaji dan pengurus masjid	Jumlah guru ngaji dan pengurus masjid ikut pembinaan dibagi jumlah seluruh guru ngaji dan pengurus masjid di Kabupaten Kaur dikali 100 %.	Bagian KESRA SETDA	
2	Meningkatnya stabilitas sosial	Membangun Sistem Tanggap Darurat Terpadu dan Pemulihan Akibat Korban Bencana	Jumlah		$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana}}{\text{Jumlah jiwa yang dilayani}} \times 100\%$	BPBD	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi masyarakat	%	Pencegahan, pengurangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kab. Kaur}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
3	Meningkatnya promosi nilai - nilai kearifan lokal dalam pembangunan	Jumlah promosi nilai - nilai budaya lokal	Jumlah		Jumlah promosi yang dilakukan	Dinas Pendidikan	

MISI 4 : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Persentase Balita Bergizi buruk	Persentase	Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi	Jumlah Balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya X 100 %	Dinkes (Bidang YANKES)	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
		Angka Kematian Ibu per 100.000	Per 100.000 Kelahiran Hidup	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jumlah kematian Ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir periode yang sama.	Dinkes (Bidang YANKES)	Cukupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan
		Angka Kematian Bayi per 100.000	Per 100.000 Kelahiran Hidup	UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Jumlah kematian bayi dibawah usia 1 Tahun, dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir yang hidup di dan periode yang sama.	Dinkes (Bidang YANKES)	Cukupan penurunan jumlah kematian bayi
		Angka Kejadian Malaria (API)	Angka		Jumlah penduduk terkena penyakit malaria per 1000 penduduk	Dinkes (Bidang YANKES)	
		Jumlah kasus DBD	Angka kurang dari 49/100.000 penduduk		Kurang dari 49/100.000 penduduk	Dinkes (Bidang YANKES)	
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Angka Rata - rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	Indikator Makro	Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun dibagi Jumlah penduduk di atas 15 tahun	BPS dan Dinas Pendidikan	
		Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase	Indikator Makro	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dibagi Jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%	BPS dan Dinas Pendidikan	
		Persentase guru yang bersertifikat	Persentase		$\frac{\text{Jumlah guru yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh guru Kab.Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	
		Persentase sekolah yang terakreditasi	Persentase		$\frac{\text{Jumlah sekolah yg terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh guru di Kab.Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	
3	Meningkatnya peran pemerintah dan LITBANG/ Perguruan Tinggi serta pelaku usaha di bidang penelitian dan pengembangan potensi daerah	Jumlah Kerjasama	Jumlah	Perlunya peningkatan kerjasama Litbang, Perguruan Tinggi s usaha untuk menjadikan masyarakat yang berdaya saing	Jumlah kerjasama antara pemerinta Kabupaten Kaur dengan lembaga litbang/Perguruan Tinggi serta pelaku usaha	Semua OPD	

MISI 5 : Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terjaganya ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Score Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan sasaran operasional pada RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan.	Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok impor dan ekspor.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pola Pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, Hortikultura, tanaman perkebunan dan Produksi ternak.	Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan	Kw/ha		$\text{Nilai Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah Produksi (kw)}}{\text{Luas Panen (Ha)}}$	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Produksi Ternak	Ekor		(Populasi awal + Kelahiran)- kejadian penyakit ternak	Dinas Pertanian	
3	Meningkatnya produksi dalam pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Produksi perikanan tangkap	Ton		Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	
		Produksi perikanan Budidaya	Ton		Jumlah produksi perikanan budidaya	Dinas Perikanan	
4	Berkembangnya Kabupaten Kaur sebagai Kabupaten tujuan wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan pariwisata Kabupaten Kaur.	Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kaur	Dinas Pariwisata	Kunjungan wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2017 - 20122**

1 SEKRETARIAT DAERAH

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	Untuk memenuhi pasal 27 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan ditegaskan dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 ttg Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD).	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD yang dinilai dari Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Tahun 2008 ttg Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai dengan PP Nomor 2007 ttg LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepda DPRD.	Sekretaris Daerah c.q. Bidang Pemerintahan	<u>Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD:</u> 1. 3,00 ≤ ≤ 4,00 : Sangat Tinggi 2. 2,00 < < 3,00 : Tinggi 3. 1,00 < < 2,00 : sedang 4. 0,00 < < 1,00 : Rendah
2		Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah khususnya pada level pemerintah tingkat kecamatan sebagaimana diatur pada PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Kecamatan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.	Pengukuran Kecamatan Berkinerja baik dilaksanakan n Kinerja (EVKIN) Camat berdasarkan penilaian pada lin yakni Bidang pelayanan Publik, bidang kebersihan, bida keindahan dan Bidang Bidang Inovasi dan kreativitas.	Sekretaris Daerah c.q. Bidang Pemerintahan	<u>Indeks Kategori Evaluasi Kinerja Camat sebagai berikut:</u> <u>No. Indeks Nilai Evkin Camat Kategori Ket</u> 1. 85 < < 10 A Raport Hijau 2. 75 < < 84,99 B Raport Kuning 3. 00 < < 74,99 C Raport Merah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Berkembangnya Ekonomi Kreatif untuk mendukung tercapainya ekonomi kerakatan yang kokoh	Persentase aktivitas Sub sektor ekonomi kreatif dan UKM	%		Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif dibandingkan subsektor ekonomi kreatif.	Sekretariat Daerah c.q. Bidang Perekonomian dan SDA.	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap terjaga kualitas lingkungan	Persentase Sumber Daya Ketersediaan Sumber Daya Alam.	%		Jumlah SDA dimanfaatkan dibandingkan seluruh SDA	Sekretariat Daerah c.q. Bidang Perekonomian dan SDA.	
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	Untuk mengetahui seberapa banyak produk hukum Daerah yang terbit sesuai dengan mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataa produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan- Undang jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 ttg pembentukan produk hukum Daerah.	Sekretaris Daerah c.q. Bidang Hukum	Kriteria mekanisme pembentukan produk hukum daerah : 1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang - Undangan dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini, 2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan program legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati, 3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan Publiknya baik	%	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.		Sekretariat Daerah c.q. Bagian Ortala	Kriteria pengukuran : 1. melaksanakan minimal 4 dari 5 kriteria indikator penerapan Standar Pelayanan Publik 2. melaksanakan minimal 3 dari 5 kriteria indikator budaya pelayanan prima 3. melaksanakan minimal 4 dari 5 kriteria indikator pengelolaan pengaduan masyarakat.
7	Meningkatnya Kualitas administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRM	%		Jumlah OPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang ULP dan BIRM dibandingkan dengan seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Kaur.	Sekretariat Daerah c.q. Bagian Pembangunan dan ULP	

2. SEKRETARIAT DPRD

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaur.	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kaur terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan.	%	Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/M.PAN/KEP/2004	$\frac{\text{Jumlah Dewan yg Puas}}{\text{Jml. Anggota DPRD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur	
		Persentase fasilitasi rapat - rapat Dewan yang tepat waktu	%	Berdasarkan program legislasi Daerah (Prolegda)	$\frac{\text{Rapat yang terlaksana}}{\text{Seluruh rapat yang terdaftar}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan.	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	%	Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD hanya memiliki wewenang terhadap fasilitas penyampaian aspirasi dari masyarakat saja, jadi maksud dari keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang tersampaikan kepada Dewan	$\frac{\text{Jml. Aspirasi yg ditindaklanjuti kpd Dewan}}{\text{Jml. Aspirasi yg masuk}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur	Aspirasi yang masuk terdiri dari : 1. Aspirasi Pengaduan 2. Aspirasi masukan terhadap penyusunan RAPERDA yang sedang dibahas dewan

3. INSPEKTORAT DAERAH

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menurunkan temuan pemeriksaan kasus atau temuan auditor eksternal	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan	%	Masih terdapat OPD yang memiliki temuan (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang - Undangan dalam kerangka Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten)	(Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi dibagi jumlah SKPD) dikali 100%	Inspektorat Kabupaten Kaur	OPD yang memiliki temuan BPK RI yang material sebesar > 1 % dan OPD dikatakan tidak lagi mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, jika OPD tersebut pada tahun penetapan pencapaian indikator, tidak lagi memiliki temuan BPK RI yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.
2.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	%	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD dibagi Jumlah Seluruh OPD) dikali 100%	Inspektorat Kabupaten Kaur	OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur yang telah menyusun SOP
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	Belum optimalnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksian internal) dikali 100 %		

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri dari masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas. Satpol PP sebagai penegak p peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi prosentase tingkat penyelesaian penegakan peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi tertib di Kabupaten Kaur.	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	1. yang dimaksud dengan penyelesaian adalah: a. Respon atas laporan b. Pengecekan atas validitas laporan c. Tindak lanjut dilapangan oleh petugas dan/ atau PPNS d. Pembuatan surat pernyataan untuk tidak melanggar atau, e. Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang mempunyai rasio anggota Linmas sesuai SPM/ jumlah Kecamatan}}{\text{jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	1. Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas di Desa/kelurahan 2. Calon Anggota Satlinmas di rekrut dari warga Masyarakat
2	Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase Laporan yang tindaklanjuti dalam 24 Jam	%	Banyaknya pengaduan masyarakat dalam hal ketertiban umum, ketentraman umum dan ketentraman masyarakat melalui media sosial seperti LAPOR, Tweeter, dll.	$\frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam/ jumlah Laporan yang diterima}}{\text{jumlah Laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	1. Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam adalah jika waktu ketika diterimanya sebuah Laporan sampai dengan waktu Laporan tersebut ditindaklanjuti, mempunyai rentang waktu kurang dari 24 jama. * Temuan Petugas Satpol PP/PPNS.
3	Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat.	Persentase Desa siaga kebakaran dan bencana lainnya.	%	Agar target yang tertuang dalam RPJMD dapat terpenuhi.	$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Kebakaran dan Bencana}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	
4	Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	Pemenuhan target yang dalam SPM dan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah kejadian yang direspon} < 15 \text{ menit}}{\text{Jumlah kejadian}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	1. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. 2. Untuk jenis layanan medis darurat dan bahan beracun disesuaikan dengan kebutuhan.

5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKD dan PSDM)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	Sesuai dengan amanat PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun fungsi.	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi (Diklat PIM Tk.I, Tk.II, Tk.III, Tk.IV) dibagi dengan jumlah pejabat struktural X 100%	BKD dan PSDM	
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi teknis	%	Sesuai dengan amanat PP 101/2000 tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional) dibagi jumlah PNS seluruhnya X 100%.	BKD dan PSDM	
		Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	Orang	Bahwa standar kompetensi teknis meliputi peningkatan pendidikan yang salah satunya melalui tugas belajar	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	BKD dan PSDM	
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standar kompetensi	Persentase jabatan yang di isi sesuai dengan kompetensi	%	Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui proses promosi dan mutasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima pada masyarakat.	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah PNS seluruhnya	BKD dan PSDM	
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai	%	Untuk menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus X 100	BKD dan PSDM	

		Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin.	%	Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja PNS.	Jumlah OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin X 100 Jumlah Total OPD	BKD dan PSDM		
		Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	%	Untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai melalui SIAP (Sistem Informasi Administrasi Presensi) yakni sistem absensi dengan melakukan perekaman wajah dan sidik jari yang terintegrasi ke seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Kaur.	Persentase kehadiran PNS per bulan X 100 % Jumlah Bulan	BKD dan PSDM		
4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak Kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	%	Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai	(Jumlah pegawai yang sudah terpenuhinya hak cuti + jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji + Jumlah PNS yang terpenuhi jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya dibagi dengan jumlah pegawai yang seharusnya cuti + seharusnya melaksanakan sumpah janji + seharusnya memperoleh TPP + jabatan yang seharusnya dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya).	BKD dan PSDM		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu).	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat: PP Nomor 11 Tahun 2009 ttg perubahan atas PP No.99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.	usulan kenaikan pangkat pegawai yang selesai tepat waktu Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai X 100%	BKD dan PSDM		
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu)	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.15 tahun 2012.	usulan kenaikan gaji berkala pegawai yg selesai tepat waktu Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai	BKD dan PSDM		
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (persentase Pensiun pegawai tepat waktu)	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat PP Nomor 19 Tahun 2013 ttg Perubahan keempat atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.				
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 ttg pelayanan publik, maka BKD dan PSDM sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah PNS Kab. Kaur.	Hasil survey dari pengguna pelayanan (PNS Kab. Kaur)	BKD dan PSDM		
		Persentase pegawai yang datanya akurat	%	Akurasi data kepegawaian diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan sesuai dengan amanat UU Nomor 5 tahun 2014 ttg ASN.	Jumlah pegawai yang datanya akurat X 100% Jumlah pegawai	BKD dan PSDM		

6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan program - program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).	<p>Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD : $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$</p> <p>asasan Sasaran jumlah sasaran pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah sasaran pd RPJMD</p> <p>Ki2 - Keselarasan indikator jumlah indikator pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah indikator pd RPJMD</p> <p>Ki3 - Keselarasan Target jumlah Target pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah Target pd RPJMD</p> <p>Ki4 - Keselarasan Program jumlah Program pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah Indikator Program pd RPJMD</p> <p>Ki5 - Keselarasan Indikator jumlah Indikator Program pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah Indikator Program pd RPJMD</p> <p>Ki4 - Keselarasan Target jumlah Target Program pd RKPd yg sesuai dg RPJMD X 100%</p> <p>Jumlah Target Program pd RPJMD</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang	
2	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase pagu Belanja Langsung RKPd yang mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang	%	Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2009, usulan masyarakat melalui musrenbang harus diakomodir minimal 30 % dari Belanja Langsung		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang	
3	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 Pasal 254; Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tingkat pelaksanaan program SKPD.	<p>Jumlah Program yg Dilaksanakan oleh SKPD X 100 %</p> <p>Jumlah Program yg Direncanakan dalam SKPD</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang	
4	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah	<p>a. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan</p>		SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen rencana SKPD. SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.	<p>Jumlah Pejabat SKPD yang berkualitas X 100 %</p> <p>Jumlah Pejabat SKPD</p> <p>Jmlh Pejabat Bappeda Litbang yg tih mengikuti diklat perencanaan X 100 %</p> <p>Jumlah Pejabat Bappeda Litbang</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang	
5	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	<p>a. Persentase capaian target kinerja yang 100 % keatas</p> <p>b. Persentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas</p>		Capaian target kinerja yang 100 % keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian program Anggaran.	<p>Jumlah program yg dicapai target kinerjanya 100% keatas X 100 %</p> <p>Jumlah program</p> <p>Jumlah kegiatan yg dicapai target kinerjanya 100% keatas X 100 %</p> <p>Jumlah program</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang	

7 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KB dan P3A)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	<i>gender</i>	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Indeks Pembangunan Gender (IDG) masuk dalam IKU karena IGD adalah sebagai tolak ukur keberhasilan gender yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur.	1. Umur panjang dan sehat 2. Indek Pendidikan Perempuan 3. Kehidupan yang layak	P2KB dan P3A	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi.	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R 2. Peraturan Menteri Perlindungan Anak No. 06 Tahun 2015 tg system pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Peraturan Menteri No. 67 Tahun 2011 ttg perubahan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah	P2KB dan P3A	
2	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak - hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	Sesuai dengan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.	Perempuan dan anak korban kekerasan yg terselesaikan penanganannya dibagi perempuan dan anak korban kekerasan yg melapor X 100%	P2KB dan P3A	
3	Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB)	Tingkat penurunan TFR	%	Tingkat penurunan TFR adalah hal yang wajib masuk dalam IKU karena menyangkut laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur.	$\frac{(\text{Jumlah Kelahiran dari usia ibu } 19 - 49)}{1000 \text{ kelahiran}} \times 100\%$	P2KB dan P3A	
4	Menurunnya Angka Pernikahan Dini	Indeks Angka Pernikahan Dini	Angka	Pernikahan berada pada usia: * Perempuan kurang dari 20 Tahun * Laki -laki kurang dari 25 Tahun	Peraturan Kepala BKKBN No. 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi KIE	P2KB dan P3A	

8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase izin penanaman modal yang direalisasikan	%		$\frac{\text{Jumlah Izin Prinsip yang direalisasikan/ditertibkan}}{\text{Jumlah semua izin prinsip}} \times 100$	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	Meningkatnya Capaian Realisasi Investasi	Jumlah Pelaku Investasi PMA/PMDN	%		Jumlah pelaku investasi PMA/PMDN didapatkan berdasarkan data izin yang ditertibkan	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Pelaku Investasi swasta Murni			Jumlah pelaku Investasi Swasta murni didapatkan dari data pelaku usaha dalam Kabupaten Kaur	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima)	Persentase terbitnya izin dan non izin sesuai SOP	%		$\frac{\text{Jumlah terbitnya perizinan sesuai SOP}}{\text{Jumlah permohonan izin yang diterima}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan	%		IKM didasarkan atas rata - rata hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak independen dan pendapat pemohon	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	Ketepatan waktu pelayanan perizinan	Rata - Rata hari penyelesaian perizinan	Hari kerja	Meningkatnya kecepatan dalam pelayanan perizinan menunjukan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di BPPT	Rata - rata hari penyelesaian izin : Jumlah izin yang terbit	Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

9 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang aktif	Prosentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	Sesuai Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2013 bahwa organisasi masyarakat harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi masyarakat harus di bina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjadi mitra pemerintah	$(X / Y) \times 100\%$ X= jumlah ormas/okp / lsm yang terdaftar dan aktif Y = jumlah ormas / okp / lsm terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	Ormas / OKP/ LSM Aktif: 1. Membuat program kerja 2. Melakukan pelatihan

10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah lingkungan di Kabupaten Kaur	Cakupan sampah yang dikelola	%		$\frac{\text{Jml. Tonase sampah yang diangkut ke TPA}}{\text{Jml. Tonase sampah Kabupaten Pertahun}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	%		$\frac{\text{Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jml. Titik kualitas udara yg dipantau}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Terjaganya kelestarian dan Fungsi lingkungan hidup	Tingkat Muka Air Tanah (MAT)	Bawah Muka Tanah		Pengukuran level muka air tanah	Dinas Lingkungan Hidup	
		Mata air yang terlindungi	Jumlah Sungai		$\frac{\text{Jml. Mata air yang dilindungi}}{\text{Jml. Mata air Prioritas yang dilindungi}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	

11 DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN KAUR

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Kaur	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum Kabupaten Kaur	%	Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Kaur sehingga dimotivasi dan difasilitasi oleh kantor Perpustakaan.	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun ini} - \text{Jumlah Pengunjung Tahun lalu}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun Lalu}}$	Kantor Perpustakaan Kabupaten Kaur	
2	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	Persentase jumlah OPD yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku	%	Untuk memenuhi kriteria standar pengelolaan arsip unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Kantor Perpustakaan Kabupaten Kaur	
3	Terwujudnya Pelayanan publik yang baik	Capaian SPM	Nilai	Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan publik yang sudah diberikan kepada masyarakat.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan No. 16 Tahun 2004)	Kantor Perpustakaan Kabupaten Kaur	
4	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka Daerah	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	Penambahan koleksi bahan pustaka (buku) dilakukan setiap tahun untuk memberikan pilihan literasi bahan bacaan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.	Akumulasi Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Kantor Perpustakaan Kabupaten Kaur	

12 RSUD KABUPATEN KAUR

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kaur terhadap masyarakat. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan/pendapat ttg pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kaur. Berdasarkan Kepmenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan Instansi Pemerintah, Maka RSUD Kabupaten Kaur melaksanakan indikator IKM. 	Nilai rata - rata hasil survey kepuasan pelanggan di RSUD Kab. Kaur	RSUD	
		Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	<ol style="list-style-type: none"> Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap RSUD Kabupaten Kaur oleh pelanggan. Sebagai jaminan kepada pelanggan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai standar Rumah Sakit. Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 ttg Rumah Sakit, maka RSUD Kabupaten melakukan akreditasi. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus melaksanakan proses kredensial, dimana salah satu persyaratan kredensial adalah akreditasi rumah sakit (<i>Permenkes Nomor : 71 tahun 2013</i>) Registrasi dan akreditasi Rumah Sakit merupakan persyaratan untuk izin operasional Rumah sakit dan perubahan kelas rumah sakit (<i>Permenkes Nomor : 56 Tahun 2014</i> ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit) 	Nilai hasil survey KARS	RSUD	
		Prosentase pelayanan Terhadap Paisein Keluarga miskin yang datang ke Rumah sakit	%	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan terhadap pasien keluarga miskin tanpa membedakan status. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.24 Tahun 2011 ttg Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan PP RI No. 101 Tahun 101 Tahun 2012 ttg penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, maka RSUD Kab. Kaur harus memberikan pelayanan Kesehatan terhadap keluarga miskin. 	Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani Rumah Sakit dibagi Jumlah seluruh pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit dikali 100 %	RSUD	

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah warga yang terlayani Dokumentasi Kependudukan	%	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	$\frac{\text{Jmlh.blngko KTP th ini} - \text{jmlh blngko akte cat.sipil th lalu}}{\text{Jumlah KTP dan KK tahun lalu}} \times 100$	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	
2	Meningkatnya Akurasi Database dan tertib Administrasi Kependudukan	Validitas Database Kependudukan	%	Meningkatnya validitas database kependudukan	Data kependudukan di kewilayahan dibagi data kependudukan Disdukcapil dikalikan 100 persen	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	

14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan	Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur jalan	%	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Panjang jalan terbangun}}{\text{Panjang rencana pembangunan jalan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Meningkatkannya kualitas jalan	Jalan dalam kondisi baik	%	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten Kaur}} \times 1000\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Peningkatan kualitas jaringan Irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Kondisi Jaringan Irigasi yang baik	%	Revitalisasi dan rekondisi jaringan irigasi	Prosentase luasan Daerah irigasi (DI) yang terlayani Air Irigasi		
4	Meningkatnya fungsi prasarana dan sarana (air minum, persampahan dan jalan) dan kualitas bangunan dan gedung	Terlayannya kebutuhan masyarakat (air minum, air limbah, drainase, dan persampahan, jalan) dan bangunan dan gedung	%	Meningkatnya ketersediaan pengolahan limbah yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas Meningkatnya ketersediaan air minum yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.	Prosentase penduduk berakses sanitasi Persentase penduduk berakses air minum Prosentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah TPA Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang kawasan	Peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis	Jumlah	Peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Prosentase pembangunan gedung yang memiliki IMB	%	Sebagai alat untuk mengukur jumlah pengaduan, permasalahan dan pelanggaran yang tidak memiliki IMB	$\frac{\text{Jumlah gedung yg memiliki IMB}}{\text{Jumlah gedung yg tidak memiliki IMB}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase penertiban pemanfaatan ruang	%	Sebagai alat ukur jumlah pengaduan, permasalahan dan pelanggaran tataruang	Jumlah pelanggaran/pengaduan yang dapat diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan/pelanggaran pemanfaatan tataruang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

15 BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Tepat waktunya penyusunan RAPBD	Hari	Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai pasal 87 ayat (5), bahwa penetapan Nota kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legeslatif ditandatangani bersama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Sesuai pasal 104 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.	Tanggal penyampaian RAPBD - tanggal Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPA	BKD	1. Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legeslatif yang telah ditandatangani 2. Nota Keuangan Raperda APBD
		Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	%	Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota	(Realisasi Pendapatan/ Anggaran Pendapatan) X 100 %	BKD	1. Anggaran Pendapatan 2. Realisasi Pendapatan
		Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah dalam melakukan pembelanjaan.	(Realisasi Belanja/ Anggaran Belanja) x 100%	BKD	1. Anggaran Belanja 2. Realisasi Belanja
2	Meningkatnya layanan penatausahaan Keuangan sesuai Peraturan Perundangan	Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	%	Sesuai amanat Pemendagri 13/2006 ttg pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 217, maka Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.	(Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu/ Seluruh jumlah SP2D yg diterbitkan)X100%	BKD	Rekap SP2D berdasarkan tanggal masuknya SPM yg lengkap dan benar serta tanggal terbitnya SP2D.
3	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca pemerintah.	%	Sesuai amanat permendagri 13/2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka jumlah neraca SKPD termasuk rincian Total BMD harus sesuai.	(Jumlah Rincian Total BMD di Simda Barang/data aset Kab. di Simda Keuangan) X 100 %	BKD	Neraca Rincian Total BMD
4	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP	Sesuai amanat permendagri 13/2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka BKD harus melakukan terbit administrasi pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerinta Kabupaten yang diperoleh.	BKD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
5	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah (pajak Hotel, Restoran ,pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak PBB dan lain - lain)	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	BKD	Kenaikan target sebesar 15% pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kabupaten Kaur dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah.
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	SPM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	Berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2014 ttg pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi Pemerintah.	Nilai hasil survey yang membayar pajak	Badan Keuangan Daerah	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu dievaluasi sehingga terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

16 DINAS SOSIAL

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PKKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{Jml. Keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya}}{\text{Jml. total keluarga miskin}} \times 100$	Dinas Sosial	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	%	Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas daerah	$\frac{\text{Jml. Masyarakat yang merasa puas atas pelayanan}}{\text{Jml. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan}} \times 100$	Dinas Sosial	
3	Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Prosentase Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berprestasi dalam penanganan PMKS	%	Partisipasi TKSK yang diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS	$\frac{\text{Jml. TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS}}{\text{Jumlah Seluruhnya TKSK yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial	
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri	%	Penyandang cacat merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{Jml. Penyandang cacat yang mampu mandiri}}{\text{Jml. Seluruh penyandang cacat yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial	
5	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	Korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{Jml. Korban bencana yg menerima bantuan kurang dari 3 hari}}{\text{Jml. Korban bencana yg mendapatkan bantuan}} \times 100$	Dinas Sosial	

17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pencegahan bencana pada masyarakat	Persentase kelurahan/desa siaga bencana	%	Agar target yang tertuang dalam RPJMD dapat terpenuhi	Jumlah kelurahan/desa siaga bencana : Jumlah kelurahan/desa siaga bencana	BPBD	
2	Meningkatkan pelayanan tanggap darurat terhadap bencana	Jumlah pelayanan tanggap darurat	%	Pemenuhan target dalam SPM dan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Korban bencana}}{\text{Jumlah jiwa yang dilayani}} \times 100\%$	BPBD	
3	Mewujudkan respon waktu tanggap darurat terhadap bencana dari 15 menit	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rule)	Waktu	Agar target yang tertuang dalam RPJMD dapat terpenuhi	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan, dan tiba di lokasi)	BPBD	
4	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	Pemenuhan target dalam Renstra dan RPJMD	Survey dan Wawancara	BPBD	
5	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	* Nilai evaluasi AKIP * Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Angka	Pemenuhan target dalam Renstra dan RPJMD	* Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat/BPK	BPBD	

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jangkauan dan askes layanan pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	Belum meratanya lembaga Paud Negeri di Kabupaten Kaur serta tingkat kesadaran dan antusias orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD	$\frac{\text{jumlah Murid keseluruhan PAUD Usia 3 -6 Th}}{\text{Jumlah Penduduk 3 -6 Th}} \times 100\%$	PAUD	
2	Meningkatnya askes layanan pendidikan dasar yang berkualitas	APK SD	%	Kurang memadai askes transportasi dan kendala tidak menetapnya domisili orang tua.	$\frac{\text{Jumlah murid keseluruhan SD usia 7 -12 Th}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 -12 Th}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		APM SD	%	Sebagian besar domisili dan penghasilan orang tua menetap dan tidak jauh dari akses pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid keseluruhan SD usia 7 -12 Th}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 -12 Th}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		APK SMP	%	Kurang memadainya askes transportasi dan kendala tidak menetapnya domisili orang tua	$\frac{\text{jumlah murid keseluruhan SMP usia 13 - 15 Th}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 Th}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		APM SMP	%	Sebagian besar domisili dan penghasilan orang tua menetap dan tidak jauh dari askes pendidikan	$\frac{\text{jumlah murid keseluruhan SMP usia 13 - 15 Th}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 Th}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		Persentase SD yang terakreditasi	%	belum dapat kuota dari BAN, belum meluluskan siswa	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan SD sudah terakreditasi}}{\text{Jumlah SD}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		Persentase SMP yang terakreditasi	%	belum dapat kuota dari BAN, belum meluluskan siswa	$\frac{\text{Jumlah keseluruhan SMP sudah terakreditasi}}{\text{Jumlah SMP}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
3	Meningkatnya kontribusi dan peran pendidikan non formal (PNF) dalam pemberantasan buta aksara	Angka buta aksara	Angka	Faktor ekonomi serta kurangnya kesadaran orang tua dan anak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yg lb tinggi	Jumlah	PAUD	
4	Meningkatnya jumlah kualifikasi, kompetensi guru dan siswa	Persentase guru SD bersertifikat	%	belum melalui proses PLPG/UKG, blm mendapatkan sertifikat pendidik	$\frac{\text{jumlah keseluruhan Guru SD yg sudah sertifikat}}{\text{Jumlah keseluruhan Guru SD}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
		Persentase guru SMP bersertifikat	%	belum melalui proses PLPG/UKG, blm mendapatkan sertifikat pendidik	$\frac{\text{jumlah keseluruhan Guru SMP yg sudah sertifikat}}{\text{Jumlah keseluruhan Guru SMP}} \times 100\%$	PROFIL PENDIDIKAN	
5	Terwujudnya pengelolaan dan pelestarian budaya lokal yg baik	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	%	Sudah berjalan sesuai dengan yang di inginkan	$\frac{\text{ah keseluruhan kesenian seni budaya di lestarikan}}{\text{Jumlah keseluruhan kesenian seni budaya}} \times 100\%$	BIDANG BUDAYA	

19 DINAS PERHUBUNGAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Angkutan umum yang layak jalan	%	Angkutan umum yang layak berpengaruh terhadap keselamatan penumpang	Lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan Umum wajib uji X 100%	Dinas Perhubungan	
		Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan	%	Pelanggaran lalu lintas berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	Selisih pelanggaran yang terjadi antara tahun n dan n -1 dibagi jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun n -1	Dinas Perhubungan	
2	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi	Nilai Hasil Survey	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi nilai IKM maka semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat.
		Nilai evaluasi AKIP	Nilai	Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai hasil evaluasi AKIP	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan

20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah penggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari meningkatnya angka lulusan sekolah. Kemungkinan juga adanya peningkatan jumlah penduduk sementara yang tidak bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran.	Jumlah Pengguran Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
2	Meningkatnya Kerjasama Penyerapan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Diutamakan	%	Mengukur berapa persen penyerapan tenaga kerja dari pencari kerja terdaftar (yang membuat kartu AK -1/ Kartu Kuning) yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibandingkan Dengan Jumlah Pencari kerja Terdaftar	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan Permenaker RI No. 2 Tahun 2014 ttg SPM Bid. Dinas Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	%	Target kinerja baru hasil reuiu Renstra oleh Menpan tujuannya untuk mengukur persentase penurunan kasus yang masuk dibanding jumlah perusahaan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan.	Jumlah kasus yang masuk Dibanding dengan Jumlah Perusahaan Berdasarkan wajib Lapor	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
		Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	%	Salah satu target perlindungan ketenagakerjaan dalam menjamin kecelakan kerja, penjamin hari tua dan jaminan pensiun bagi para pekerja/buruh.	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Dibandingkan Dengan jumlah pekerja/buruh Berdasarkan wajib lapor.	Dinas Tenaga Kerja	
4	Meningkatnya Minat Bertransmigrasi	Persentase Transmigran yang tidak meninggalkan lokasi trans.	%	Banyaknya transmigran yang meninggalkan lokasi trans	$\frac{\text{Jumlah Transmigran yang tdk meninggalkan trans}}{\text{Jumlah Seluruh peserta transmigran}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja	

1	Meningkatnya Produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan Hortikultura dan tanaman perkebunan	Produktivitas Tanaman Pangan ,Hortikultura dan tanaman perkebunan.	Kw/ha	Tanaman pangan utama yaitu padi disamping tanaman pangan lain yaitu jagung, umbi - umbian dan komoditi kacang - kacangan dan tanaman hortikultura yang meliputi jenis tanaman sayur - sayuran dan buah-buahan.Tanaman perkebunan antara lain Kopi, kelapa sawit, lada dan tanaman perkebunan lainnya.	Nilai Produktivitas : Produktivitas = $\frac{\text{Produksi (kw)}}{\text{Luas Panen (Ha)}}$	Dinas Pertanian	
2	Meningkatnya produksi ternak	Peningkatan populasi ternak	ekor	Pertambahan penduduk akan meningkatkan konsumsi daging sehingga dibutuhkan stok daging berupa ternak hidup, peningkatan populasi juga akan meningkatkan kesejahteraan peternakan.	(Populasi awal + kelahiran) - Kejadian penyakit ternak	Dinas Pertanian	
3	Kelembagaan Petani	Kelas Poktan dan Gapoktan	Kelas	Merupakan penguatan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaan.	Hasil Penilaian kelas Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Semakin tingginya kelas kelompok tani, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan kelompok tani.

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan swadaya murni dan peran masyarakat	Prosentase peningkatan kontribusi swadaya murni masyarakat dalam membangun kewilayahan.	%	Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	$(X0 - X1)/X1 \times 100 \%$ Ket : Xo = Jumlah swadaya tahun berjalan X1 = Jumlah swadaya tahun yang lalu	DPMD	
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase penurunan penduduk miskin	%	Peraturan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 2010 tgg percepatan penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah - langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis.	$(X1 - X0)/X1 \times 100 \%$ X1 = Jumlah penduduk miskin tahun yg lalu X0 = Jumlah penduduk miskin tahun yg berjalan	DPMD	

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Berkembangnya tata kelola Pemerintahan berbasis e-government	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government / aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	Belum semua SKPD terkoneksi secara online	Jumlah aplikasi/ Jmlh target 150 aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2	Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan Infrastruktur jaringan	Prosentase fasilitas umum yang sudah memiliki WIFI	%	Tingginya masyarakat dalam mencari informasi melalui internet	Jumlah fasilitas umum yang sudah di pasang Wifi di Kabupaten Kaur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu	%	Belum semua OPD menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat	Jumlah tindaklanjut OPD/jumlah pengaduan yang diterima Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Prosentase OPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	Belum maksimalnya para pejabat Pengelolaan Data Informasi (Pedasi) di OPD dan BUMD	Jumlah OPD yang sudah memiliki Pengelolaan Data Informasi (pedasi) secara online	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Informasi dan Komunikasi	%	Sesuai amanat Permen Kominfo Nomor : 22/PER/M. KOMINFO/12/12/2010 Tanggal 20 Desember 2010	Sesuai Permen Kominfo Nomor : 22/PER/M. KOMINFO/12/12/2010	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi serta program kerjasama Infomasi dan Media Massa.

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, ke gawat darurat dan rujukan khususnya Masyarakat miskin	Persentase pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang di tangani	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 741 / MENKES / PER / VII / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator penyakit menular setelah di hitung dari nilai capaian di bagi target x 100 % di Bagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	1. Cakupa Acute Flacid Faralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk <15 Tahun 2. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita 3. Cakup Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 4. Cakupan Penderita DBD yang di tangani 5. Cakupan Penemuan Penderita Diare 6. Penderita Penyakit Menular Lainnya yang di tangani
		Persentase Pemenuhan Pencapaian Pelayanan Kesehatan Lainnya	%	Kebutuhan akan pelayanan kesehatan terus berkembang dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan indikator yang di gunakan dalam pelayanan kesehatan dasar lainnya di luar SPM dan MDG	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pelayanan kesehatan lainnya setelah di hitung dari nilai capaian di bagi target x 100% di bagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	Persentase balita di timbang berat badan D/S Cakupan KK yang rawan di bina Cakupan pelayanan kesehatan dasar, swasta sesuai standar
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat izin setelah di hitung dari nilai capaian di bagi target x 100% di bagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat izin Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin Puskesmas yang terakreditasi
		Persentase pasien miskin yang di rujuk dan di layani oleh PPK II	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pasien miskin yang mendapat pelayanan di PPK II setelah di hitung dari nilai capaian di bagi target x 100% di bagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus di tangani sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota
		Persentase kecamatan dengan pemenuhan puskesmas di bandingkan dengan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk	%	Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap Kecamatan harus memiliki puskesmas sesuai standar (rasio puskesmas dengan jumlah penduduk)	Kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar di bandingkan dengan jumlah kecamatan dalam preode tertentu x 100%	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas
		Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Persentase total dari nilai persepsi per unsur di bagi dengan total unsur yang terisi di kalikan nilai penimbang x 100	Dinas Kesehatan	Hasil survei kepuasan pelanggan di pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Persentase pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia,	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 741 / MENKES/ PER/ Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, remaja, ibu dan lansia, setelah di hitung dari nilai capaian di bagi target x 100% di bagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	1. Indikator Bayi (cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani; cakupan kunjungan bayi (umur 29 hr-11 bulan) cakupan Desa / Kelurahan UCI) 2. Indikator Balita (cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; cakupan pelayanan anak balita; cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED); cakupan pelayanan nifas)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wis Kabupaten Kaur bekerja sama dengan Dinas /instansi te (Dishub) serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan	
2	Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase Organisasi Pemuda yang mandiri	%	Berdasarkan Amanat UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	$\frac{\text{Organisasi Pemuda yang Mandiri}}{\text{Organisasi Pemuda yang Kabupaten Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi	%	Berdasarkan Amanat UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	*Jumlah medali Emas yang diperoleh *Jumlah medali Perak yang diperoleh *Jumlah medali Perunggu yang diperoleh	Dinas Pemuda dan Olahraga	
4	Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Olahraga masyarakat Rutin	%	Berdasarkan Amanat UU No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Olahraga}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kaur}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	
5	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Olahraga	Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan Prasarana Olahraga	%	Berdasarkan Amanat UU No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yg memiliki sarana prasarana olahraga}}{\text{Jumlah Kecamatan yg ada di Kab.Kaur}}$	Dinas Pemuda dan Olahraga	

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya peranan perikanan budidaya terhadap peningkatan produksi perikanan	Prosentase peningkatan produksi budidaya perikanan	%		Peningkatan = $(\text{Produksi Budidaya Tahun } (n) - \text{Produksi Budidaya Tahun } (n-1)) / (\text{Produksi Budidaya Tahun } (n-1)) \times 100$ Ket: $n = \text{realisasi tahun ini}$ Penjelasan : Jumlah Produksi Budidaya adalah hasil penjumlahan produksi Budidaya Air Tawar dengan produksi Budidaya Air Payau selama 1 tahun.	Dokumen statistik perikanan budidaya	<i>Bidang Budidaya</i>
2	Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan	Prosentase peningkatan nilai tambah pembudidaya ikan	%		Peningkatan = $(\text{NTPi tahun } (n) - \text{NTPi tahun } (n - 1)) / \text{NTPi tahun } (n - 1) \times 100$ NTPi = Yt/ET Yt = Yft + YNFt Et = Eft + Ekt Ket: $n = \text{realisasi tahun ini}$ $n - 1 = \text{realisasi tahun lalu}$ Yft= Total pendapatan pembudidaya ikan dr usaha perikanan priode t YNFt = Total pendapatan pembudidaya ikan usaha dr usaha non perikanan priode t Eft = Total pengeluaran Pembudidaya ikann usaha perikanan priode t Ekt = Total pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi keluarga pembudidaya ikan priode t t = Priode waktu	Dokumen hasil survei penghitungan NTPi (nilai Tambah pembudidaya ikan)	<i>Bidang Budidaya</i>
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%		Peningkatan = $(\text{Produksi tangkap tahun } (n) - \text{Produksi tangkap tahun } (n-1)) / (\text{Produksi Tangkap tahun } (n-1)) \times 100$ Ket : $n = \text{realisasi tahun ini}$ $n - 1 = \text{realisasi tahun lalu}$	Dokumen Statistik Perikanan Tangkap	<i>Bidang Budidaya</i>
4	Tercapainya konsumsi ikan perkapita	Peningkatan Konsumsi Ikan Perkapita	%		Peningkatan $(\text{TKI tahun ini } (n) - \text{TKI tahun ini } (n-1)) / (\text{TKI tahun ini } (n-1)) \times 100$ Ket : $n = \text{Tahun ini}$ $n - 1 = \text{Tahun lalu}$		

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Score Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan sasaran operasional pada RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan.	<i>Cara Perhitungan PPH:</i> Penyediaan Pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor.	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya Persentase tertanganinya daerah - daerah yang terkena rawan pangan.	%		$\frac{\text{(Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani)}}{\text{(Jumlah daerah yang terkena rawan pangan)}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	
		Penguatan Cadangan Pangan	%		$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten}}{100 \text{ Ton}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan	Data Produksi, Data stok cadangan pangan Kab. Kaur
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%		$\frac{\text{(Jumlah sampel pangan yang aman di konsumsi)}}{\text{(Jumlah total sampel pangan yang diuji)}} \times 100\%$		
		Meningkatnya jumlah kelompok Tani yang menerapkan sistem' jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan.	Klp		Jumlah Kelompok tani yang memiliki Sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Data Klp. Tani
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas distribusi pangan	Terpenuhinya pola dan alur distribusi pangan Kab.Kaur	%		Jumlah Kecamatan se Kabupaten Kaur yang terpantau pola dan alur distribusi pangannya.	Dinas Ketahanan Pangan	Data laporan dari Tim Laporan berkala kondisi Ketahanan Pangan Daerah
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%		Hasil analisis data pasokan dan harga pangan mingguan bulanan selama satu tahun.	Dinas Ketahanan Pangan	Data pasokan, harga dan askes pangan dari pedagang dan Instansi terkait (BPS dan DISPERIDAG).

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan	Prosentase rumah layak huni	%	Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni tersebar di Kabupaten Kaur	$\frac{\text{Jumlah rumah yang tidak layak huni}}{\text{Jumlah rumah rumah di Kab.Kaur}} \times 100\%$	Program Pengembangan Perumahan	
		Prosentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	%	Setiap tahun harus berkurang luas kawasan kumuh di Kabupaten Kaur	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh}}{\text{luas permukiman}} \times 100\%$	Program Pengembangan Perumahan	
		Prosentase daya tampung rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR)	%	Masih terdapatnya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah terutama masyarakat berpenghasilan rendah	$\frac{\text{Jumlah rumah yang disediakan}}{\text{Jumlah Pemohon}} \times 100\%$	Program Pengembangan Perumahan	
2	Meningkatnya aset tanah pemerintah yang bersertifikat	Prosentase tanah pemerintah yang memiliki sertifikat	%	Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah tanah pemerintah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh tanah Pemerintah}} \times 100\%$	Program Pengembangan Perumahan	

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kategori	Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 ttg pelayanan Publik dan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan.	Sesuai dengan SK. Menpan No. 16 Tahun 2014 tentang Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey	
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	Sesuai Amanat Perpers No. 29 Tahun 2014 ttg SAKIP berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Juklak evaluasi AKIP	Sesuai dengan Permenpan No. 20 TAHUN 2013 tentang Juklak evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Sesuai amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan.	Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklanjuti seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan	Berita acara penyelesaian ditindaklanjuti dari seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan	

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI